

VISI DAN MISI MUHAMMAD JUSUF KALLA DAN WIRANTO

A. PENDAHULUAN

Visi dan misi calon presiden pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi bangsa dan negara. Hal ini tidak saja demi mematuhi amanah UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025), tapi juga demi menjaga kesinambungan pemerintahan sebelumnya serta memberikan landasan dan bekal bagi pemerintahan sesudahnya. Kesinambungan ini sangat kita butuhkan agar apa yang sudah tercapai oleh pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan dan dikembangkan oleh pemerintahan sesudahnya. Kesinambungan inilah kelak yang diharapkan terakumulasi menjadi modal sosial agar bangsa ini dalam perjalanannya sanggup mencapai posisi keseimbangan baru menuju suatu bangsa yang kuat, modern, dan bermartabat. Begitulah seharusnya. Pembangunan dari satu pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya saling menyambung dan mengisi, sehingga pada akhirnya kita dapat mewujudkan visi bangsa 2025, yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Meskipun demikian, perubahan tetap relevan dan diperlukan sesuai dengan perbedaan visi dan misi serta perkembangan dinamis yang terjadi. Dalam kerangka seperti inilah visi dan misi ini kami susun.

Visi dan misi tentulah sebatas pandangan kami terhadap berbagai tantangan persoalan kebangsaan dan kenegaraan lima tahun yang akan datang. Visi dan misi ini sepenuhnya berlandaskan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sekarang. Dasar lainnya yang cukup penting adalah skala prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJPN untuk periode 2010-2014, di mana disebutkan prioritasnya adalah "memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang" yang ditandai oleh peningkatan rasa aman dan damai, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan daya saing perekonomian serta pembangunan berkelanjutan.

Dengan dasar inilah kami memandang perjalanan bangsa lima tahun yang akan datang dalam sebuah visi tersendiri. Visi tersebut akan diturunkan dalam beberapa misi dan selanjutnya diuraikan dalam sasaran dan program pembangunan. Namun sebelumnya, izinkan kami menguraikan prasyarat penting dan mendasar yang harus dipenuhi untuk menghadapi tantangan lima tahun yang akan datang.

Indonesia adalah sebuah negara yang besar, beragam, dan multietnis, yang sering menghadapi persoalan yang kompleks yang muncul bersamaan, pada suatu tempat, dan berasal dari rentang sejarah ratusan tahun yang berbeda. Pertemuan beragam masalah ini menjadikan tantangan yang dihadapi tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Dalam hubungan ini, maka Indonesia lima tahun yang akan datang membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan transformatif, serta pemerintahan yang lebih bersih. Kepemimpinan seperti itu sangat dibutuhkan dalam kerangka

mengurai beragam persoalan bangsa yang rumit, meningkatkan pendapatan yang masih rendah, hingga merajut berbagai elemen sosial dalam irama yang selaras. Sementara pemerintahan yang bersih ditandai dengan keterbukaan, bertanggung jawab, dan memiliki kualitas moral yang tinggi.

Mempertimbangkan luasnya spektrum permasalahan yang akan dihadapi, maka kepemimpinan kuat dan transformatif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih haruslah memenuhi tiga persyaratan sekaligus. *Pertama*, kemampuan mengenali berbagai persoalan teknis administratif dan melahirkan terobosan gagasan berdasarkan visi yang diyakininya. *Kedua*, kemampuan menyampaikan pesan pada beragam kelompok dan golongan masyarakat agar tidak hanya substansi pesan dapat dimengerti dengan baik, melainkan juga mampu menjaga harmoni dan solidaritas sosial agar tetap kukuh dalam mosaik Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, dan ini sangat esensial, keteguhan komitmen yang didasari kebeningan hati nurani, kecepatan melangkah, dan keberanian dalam mengambil keputusan dalam saat-saat yang sulit. Kualitas seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh kepemimpinan Indonesia ke depan. Sedangkan kualitas moral bagi pemimpin adalah keniscayaan karena akan berfungsi sebagai teladan, perlambang anak bangsa terbaik, dan sekaligus sebagai pertanda representasi kualitas moral bangsa secara keseluruhan.

Mengapa harus JK-Wiranto? Kami tidak berpretensi lebih baik dari yang lain. Namun pengalaman kami dalam menggeluti berbagai persoalan bangsa memberi pelajaran dan bekal bahwa yang sangat mendasar dibutuhkan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa ke depan adalah keteguhan komitmen, kecepatan melangkah, keihlasan, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Hal ini tidaklah mudah karena akan berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit, risiko tinggi yang belum ada jaminan keberhasilannya, dan belum tentu ada padanannya dalam sejarah. Belum lagi kontroversi dan risiko politik yang akan mengiringinya. Dalam situasi seperti itu sangat dibutuhkan keteguhan dan keyakinan hati nurani bahwa apa yang kita putuskan benar dan baik bagi rakyat.

Manfaat terbesar sebuah keputusan haruslah untuk kepentingan sebagian besar rakyat sebagai pemilik sah negeri ini. Tidak boleh sebuah keputusan politik hanya menguntungkan segelintir orang atau berorientasi jangka pendek. Keputusan yang benar menurut hemat kami adalah keputusan yang mampu memecahkan berbagai persoalan mendasar kenegaraan dan kebangsaan secara cepat dan tegas, walaupun dalam jangka pendek, terasa pahit, dan getir. Namun, dalam jangka panjang kemanfaatannya jauh lebih besar.

Keinginan meningkatkan pendapatan rakyat umpamanya, tidak mungkin dilaksanakan kalau menghamburkan sumber daya, memboroskan anggaran, atau kepentingan lain yang berjangka pendek. Untuk sejahtera, kata pepatah, "hemat pangkal kaya", kita harus berhemat, mengelola secara efisien, dan rela berkorban untuk kepentingan jangka panjang. Cara kita menangani masalah juga demikian. Tidak boleh tujuan dikalahkan oleh problem-problem teknis, apalagi menghalalkan segala cara. Kita tidak boleh terpaku dengan cara-cara lama dan konvensional yang terbukti lamban dalam menangani berbagai persoalan bangsa. *Thinking out of the box.*

Harus disadari, selalu ada cara yang murah dan efisien dalam memecahkan masalah bangsa, tanpa harus mengorbankan harga diri dan kedaulatan bangsa. Roh zaman telah berubah. Telah lahir banyak masalah yang sering kali tidak memiliki padanannya dalam sejarah, sehingga cara mengatasinya memerlukan ikhtiar yang melampaui zaman itu sendiri. Terobosan-terobosan itulah yang harus selalu kita lakukan.

Ini tidak berarti kami mengabaikan kepentingan jangka pendek. Kemiskinan dan pengangguran yang masih besar di negeri ini adalah sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. Penyelesaiannya haruslah komprehensif dan sistemik. Dalam jangka pendek, program seperti BLT, bimbingan teknis, bantuan modal, dan lainnya tetap dibutuhkan. Namun, pemecahan jangka panjang harus mulai dilaksanakan, misalnya dengan memberikan mereka akses yang lebih baik kepada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya seperti listrik, energi, dan jalan. Penyediaan infrastruktur dasar ini adalah sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda dengan alasan apa pun, karena hanya dengan adanya kesediaan infrastruktur dasar yang memadai persoalan yang mendasar dapat mulai dipecahkan.

Menciptakan atmosfir usaha yang kondusif bagi dunia usaha sangat diperlukan agar mereka mampu meningkatkan usahanya dan mensejahterakan keluarganya. Kesejahteraan pada level bawah masyarakat harus menjadi prioritas. Sebab, dengan semakin naiknya kesejahteraan rakyat miskin semua pihak akan diuntungkan. Pendidikan politik dapat dijalankan dengan baik, demokrasi menjadi lebih sehat, SDM akan semakin baik, sehingga menghasilkan sumber daya manusia terampil, dan dunia usaha pun semakin bergairah karena daya beli masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan kesejahterannya. Oleh karena itulah, peningkatan kesejahteraan adalah kunci dari beragam persoalan. Bila masalah ini dapat diselesaikan, dengan sendirinya memudahkan penyelesaian masalah-masalah lainnya.

Kehidupan sosial politik yang diatur dalam demokrasi juga harus semakin sehat, seimbang, efisien, dan beretika. Kualitas demokrasi yang sehat akan terlihat apabila rakyat semakin percaya dan yakin terhadap lembaga demokrasi untuk menyalurkan kehendak, aspirasi, dan suasana batin hati nurani rakyat. Sementara itu, para aktor yang terlibat di dalamnya bertanggung jawab dalam melakukan proses politik, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak. Komunikasi politik tidak boleh berhenti setelah Pemilu usai, melainkan harus terus berjalan berkesinambungan sehingga terjadi keterkaitan batin antara rakyat dengan para wakil dan pemimpinnya.

Para aktor politik juga harus menyadari proses politik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, apalagi menggunakan cara-cara yang tidak patut untuk diteladani oleh generasi yang akan datang. Tidak ada yang diuntungkan oleh proses politik yang lambat. Semakin lama proses politik berlangsung, rakyat akan semakin lelah menunggu, apatisme dapat semakin subur. Para aktor yang terlibat di dalamnya juga akan semakin kelelahan. Untuk itulah, proses politik harus diupayakan berjalan secara efisien dan efektif. Penyeragaman pelaksanaan Pemilu, umpamanya, adalah gagasan

yang dapat memangkas pemborosan sumber daya politik, ekonomi, dan sosial. Hubungan eksekutif dan legislatif yang proporsional dapat mendorong percepatan proses pengambilan keputusan. Gagasan pentingnya proses yang cepat ini dapat pula diterapkan untuk reformasi birokrasi. Pendeknya, mengupayakan proses kehidupan politik yang cepat, efisien, dan tanggap akan menguntungkan semua pihak. Oleh karena itulah, kehidupan demokrasi politik harus selalu didorong berjalan secara sehat, seimbang, efisien, dan efektif.

Dalam kehidupan sosial budaya, harus terus diupayakan penguatan solidaritas sosial sebagai sesama warga bangsa. Saling percaya dan sadar bahwa kita sesungguhnya saling membutuhkan dan terikat komitmen bersama terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan hal yang paling esensial dalam membangun kekuatan bangsa. Etos ini sangat penting untuk terus kita pupuk dan pelihara karena dari sinilah kita dapat menyelesaikan berbagai konflik sosial politik dengan biaya yang paling murah. Fondasi batin saling percaya dan saling membutuhkan juga sangat penting dalam membangun harmoni sosial di tengah keberagaman agama dan suku bangsa. Pada saat yang sama, landasan spirit sosial seperti ini juga sangat dibutuhkan untuk membangun daya saing perekonomian nasional. Demikianlah, semua pihak pada dasarnya sangat diuntungkan apabila sesama warga bangsa tumbuh kepercayaan, mampu saling tolong menolong, dan merajut solidaritas sosial yang kuat. Untuk itulah, kami berkomitmen untuk menyegarkan kembali semangat saling percaya dan membutuhkan demi kuatnya nasionalisme Indonesia.

Gagasan-gagasan pokok di atas akan diuraikan lebih lengkap dalam buku ini. Bagian pertama, menyoroti lebih detail berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini lima tahun ke depan. Berdasarkan telaah tersebut, kami merumuskan visi dan misi. Selanjutnya, misi kami uraikan secara lebih detail dalam program unggulan

Demikianlah visi dan misi ini kami persembahkan sebagai wujud kecintaan, ketulusan, dan pengabdian kami yang paling dalam, sekaligus sebagai bentuk dan penjabaran doa yang paling khusus kepada bangsa Indonesia. Semoga dalam perjalanannya, bangsa ini menjadi bangsa yang mendapat rahmat seluas-luasnya, tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain dan kemanusiaan secara keseluruhan.

B. TANTANGAN BANGSA

Sudah banyak capaian yang kita peroleh sejak krisis ekonomi 1998. Demokrasi semakin terwujud dalam kehidupan nyata, pertumbuhan ekonomi mulai pulih, dan kerukunan sesama bangsa mulai tumbuh kembali. Namun, seiring dengan prestasi yang kita peroleh, muncul tantangan baru yang akan menjadi agenda pemerintahan yang akan datang. Penanganan masalah-masalah ini sangat mendesak dan membutuhkan langkah cepat agar tidak mengganggu perjalanan bangsa ke depan. Di bawah ini kami menyoroti sejumlah masalah yang perlu mendapat penanganan segera.

1. Ekonomi

Tantangan ekonomi yang akan menonjol selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- **Tingkat kemiskinan sudah berkurang, namun masih bisa dan perlu diturunkan.** Dengan memakai patokan batas garis kemiskinan sekitar Rp166.697 per orang per bulan, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 35 juta atau sekitar 15,4 persen. Angka ini masih perlu diturunkan agar semakin banyak rakyat Indonesia yang sejahtera.
- **Tingkat pengangguran sudah menurun namun masih bisa dan perlu diturunkan.** Sekarang ini tingkat pengangguran masih 8,39 persen dari jumlah angkatan kerja. Angka ini seharusnya diturunkan dengan berbagai program pembangunan.
- **Pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5,6 persen dalam lima tahun terakhir.** Pertumbuhan sebesar ini harus terus ditingkatkan untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan mengurangi kemiskinan.
- **Ketimpangan pendapatan masih terjadi.** Dengan menggunakan indikator Rasio Gini, pada 2005 Rasio Gini sebesar 0,34 dan pada 2008 meningkat menjadi 0,37 (angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan angka 1 merupakan ketimpangan sempurna). Gini rasio ini harus terus diturunkan dengan mengikis kemiskinan, pengangguran, dan memberdayakan UMKM.
- **Peran APBN dalam mendorong perekonomian masih perlu ditingkatkan.** Pada 2008, umpamanya, belanja pegawai dan barang 17 persen, pembayaran utang 8,9 persen, subsidi 28,1 persen, bantuan sosial 5,8 persen, pengeluaran pembangunan 7,4 persen, pengeluaran rutin lainnya 3,1 persen dan anggaran belanja untuk daerah 29,8 persen. Untuk ke depan, belanja APBN untuk pengeluaran pembangunan harus lebih ditingkatkan sehingga mampu menstimulasi perekonomian.
- **Pertumbuhan investasi langsung masih perlu ditingkatkan.** Sekarang ini sudah ada kegairahan dalam bidang investasi langsung. Nilai realisasi PMA pada 2008 mencapai 14,8 miliar dolar AS. Sedangkan realisasi PMDN pada tahun 2008 mencapai Rp 20 triliun. Jumlah ini jelas masih perlu dipacu lebih tinggi lagi agar mampu menggerakkan perekonomian secara lebih cepat.
- **Pertumbuhan industri perlu ditingkatkan.** Pertumbuhan sektor industri pengolahan sekitar 5 persen selama lima tahun terakhir. Laju ini perlu terus ditingkatkan dengan memperbaiki iklim investasi
- **Pertumbuhan ekspor non migas mencapai sekitar 18 persen per tahun sejak 2003 hingga sekarang.** Namun, pertumbuhan besar tersebut lebih banyak didorong oleh harga komoditas yang melonjak di pasar internasional dan bukan oleh peningkatan efisiensi, nilai tambah dan daya saing industri di dalam negeri.
- **Swasembada pangan perlu dipertahankan dan diperluas.** Sekarang ini Indonesia sudah berhasil melakukan swasembada beras.

Prestasi ini masih perlu ditingkatkan dengan meningkatkan produksi agar swasembada dapat terus dipertahankan dan menghasilkan surplus untuk diekspor. Di samping itu, swasembada jagung, kedelai, gula harus terus diupayakan.

- **Revitalisasi pertanian perlu terus dipercepat.** Program yang sudah berjalan sekarang ini masih perlu dilanjutkan lebih cepat untuk mengejar peningkatan kesejahteraan petani dan memantapkan swasembada pangan.
- **Kebutuhan energi semakin melonjak.** Seiring semakin menipisnya cadangan BBM, maka perlu dipercepat program konversi energi untuk mengejar kebutuhan yang terus melonjak. Optimalisasi pemanfaatan gas untuk dalam negeri masih terkendala oleh berbagai kontrak lama yang diorientasikan ekspor. Sementara itu, kebutuhan listrik masih terkendala oleh belum banyaknya investasi pembangkit yang menggunakan energi primer yang lebih murah, seperti panas bumi.
- **Kebutuhan infrastruktur semakin meningkat.** Meskipun sejak lima tahun yang lalu telah dilakukan program percepatan pembangunan infrastruktur, program ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur masih perlu diteruskan.
- **Lembaga keuangan dan perbankan belum optimal menyalurkan kredit ke sektor riil.** Perbankan masih dilanda problem risiko kredit yang tinggi, dan belum mampu secara optimal membiayai aktivitas ekonomi di sektor riil dan proyek-proyek jangka panjang.
- **Perlunya pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim.** Berbagai kebijakan yang ditujukan untuk pemeliharaan lingkungan hidup sudah semakin baik, namun penegakan peraturan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, perlu segera dilakukan antisipasi kebijakan terhadap perubahan iklim.

2. Politik

Permasalahan dalam bidang politik yang menonjol selama lima tahun belakangan ini adalah:

- **Sistem Pemilu perlu lebih efisien.** Ada 483 kabupaten, 97 kota, dan 33 provinsi yang melaksanakan Pilkada dalam waktu yang berbeda-beda. Belum lagi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Frekuensi Pemilu dan Pilkada dalam waktu yang berbeda-beda ini menyebabkan pemborosan sumber daya politik dan ekonomi yang sangat besar.
- **Jumlah partai terlalu banyak dengan kekuatan terfragmentasi.** Masalah ini menyebabkan sistem presidensial menjadi kurang efektif. Setiap pemerintahan harus membangun koalisi baru yang tidak mudah, belum lagi dibutuhkan waktu memperkuat soliditas koalisi. Persoalan semakin problematis karena kekuatan di parlemen juga terfragmentasi. Akibatnya, pengambilan keputusan politik menjadi lamban dan harus terus-menerus melakukan kompromi politik. Sistem presidensial menjadi tidak efektif.

- **Reformasi birokrasi sudah berjalan, namun perlu dipercepat.** Seiring dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus meningkat, maka birokrasi pemerintahan harus lebih cepat melakukan reformasi agar lebih transparan efektif, mampu melayani masyarakat secara lebih tangkas, tanggap dan cepat.
- **Ketidakseimbangan peran dan fungsi antar-lembaga negara.** Sistem perwakilan yang berlaku sekarang ini menganut sistem tiga kamar, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Tetapi desain fungsi dan perannya hanya memberi tekanan kepada DPR untuk menjalankan fungsi *budget*, legislasi, dan pengawasan. MPR yang dianggap lembaga tertinggi negara hanya mempunyai fungsi yang sangat terbatas. Sementara itu, DPD tidak mempunyai kewenangan apapun kecuali memberi usul dan masukan kepada DPR. Kondisi ini jelas menimbulkan kesenjangan.
- **Hubungan pusat dan daerah yang belum efektif.** Gubernur dan Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat telah mendorong kuatnya posisi dan peran kepala daerah. Di satu sisi, hal ini sangat menggembirakan karena menunjukkan legitimasi yang kuat dari pemerintahan daerah, sehingga memungkinkan untuk melakukan percepatan pelayanan publik. Namun di sisi lain, situasi itu kerap kali mengganggu efektivitas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Program-program pemerintah pusat sering kali menghadapi kendala pada level pemerintahan daerah ketika diimplementasikan langsung ke rakyat. Padahal, sebagaimana diamanatkan UU Pemerintahan Daerah, posisi gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah.
- **Peran Indonesia dalam kancah internasional, perlu semakin progresif.** Sejak masa krisis, peran Indonesia dalam percaturan duniatelah berubah. Situasi itu menjadikan kontribusi Indonesia dalam berbagai persoalan internasional belum efektif. Karena itu, kontribusi Indonesia dalam kancah intrenasional perlu ditingkatkan.

3. Pertahanan dan Keamanan

Ada beberapa tantangan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang menonjol selama lima tahun yang akan datang, yaitu:

- **Alutsista TNI dan Polri yang sudah tua harus dimodernisasi.** Hal ini mendesak dilakukan agar pertahanan Indonesia semakin kokoh dan kemampuan Polri dalam menangani persoalan keamanan semakin tinggi.
- **Kesejahteraan prajurit TNI perlu ditingkatkan.** Sejalan dengan modernisasi alutsista, profesionalisme prajurit harus ditingkatkan. Elemen penting dari peningkatan profesionalisme adalah peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

4. Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tantangan hukum dan HAM lima tahun yang akan datang adalah :

- **Perlunya pembenahan kewenangan institusi pemberantasan korupsi.** Kendatipun peraturan perundangan telah membedakan

kewenangan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, dalam praktiknya masing-masing lembaga sering mengalami *overlapping* dan dilanda ketegangan. Ini menyebabkan gerakan pemberantasan korupsi menjadi kurang efektif.

- **Penegakan hukum masih belum memenuhi rasa keadilan.** Sudah banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan disiplin aparat penegak hukum. Namun, upaya tersebut masih harus ditingkatkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- **Peraturan perundangan belum konsisten satu sama lain.** Sudah banyak dilakukan dalam rangka menciptakan konsistensi peraturan perundangan. Upaya ini harus terus dilanjutkan agar sistem peraturan perundangan semakin konsisten dan koheren satu sama lain, sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum dan mendukung kebijakan yang efektif dan administrasi pemerintahan berjalan secara optimal.
- **Perlindungan terhadap HAM masih belum optimal.** Sudah banyak kemajuan dalam bidang perlindungan HAM selama ini. Kasus pelanggaran HAM sudah banyak berkurang. Agenda selanjutnya adalah melengkapi berbagai peraturan perundangan berkaitan dengan perlindungan HAM secara lebih menyeluruh dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara dalam memenuhi HAM warga negara, terutama hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

5. Pendidikan Kesehatan dan Sosial Budaya

- Pemerataan pendidikan sudah banyak dilakukan. Agenda **permasalahan selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan angka partisipasi sekolah di tingkat SMP dan SMA.** Peningkatan partisipasi sekolah harus disertai dengan peningkatan kualitas dan pemerataan ketersediaan.
- Sudah banyak kemajuan dalam bidang kesehatan. Agenda pembangunan kesehatan ke depan adalah **mengupayakan pemerataan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan serta SDM medis** ke daerah-daerah tertinggal dan kurang berkembang.
- Program asuransi kesehatan bagi rakyat miskin yang sudah berjalan sekarang, perlu diperluas cakupannya dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional.
- Program penanganan terhadap anak terlantar akan terus ditingkatkan.
- Kohesi sosial masih perlu ditingkatkan dengan memperluas pendidikan kewarganegaraan, pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta memupuk semangat nasionalisme.

C. VISI DAN MISI

Cita-cita utama pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara singkat dapat dicuplik dari Pembukaan UUD 1945, yaitu terwujudnya: (i) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (ii) Perikehidupan kebangsaan yang bebas; dan (iii) Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara jelas spirit Pembukaan UUD 1945 itu memuat tiga pilar penting bagi Indonesia, yakni menciptakan keadilan, membangun kemandirian, dan menjaga martabat bangsa. Keadilan akan menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan antarwarga negara, kemandirian memberi ruang penyelenggara negara untuk memutuskan arah dan tujuan bangsa secara berdaulat, dan martabat akan mengantarkan bangsa ini berdiri tegak sejajar dengan bangsa lainnya. Tiga bangunan inilah yang mesti diperjuangkan dalam membangun Indonesia ke depan. Cita-cita bangsa itulah yang mendasari kami untuk mengusung visi :

INDONESIA YANG ADIL, MANDIRI, DAN BERMARTABAT

Visi ini sangat penting dan kontekstual untuk menghadapi tantangan Indonesia lima tahun yang akan datang. Tantangan itu harus disyukuri karena di dalamnya terkandung capaian yang sudah diperoleh bangsa dan negara selama ini sekaligus mengandung persoalan yang perlu dipecahkan. Untuk menghadapi tantangan itu, dibutuhkan komitmen terhadap visi yang diyakini akan membimbing dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa untuk mewujudkan impian bersama, mewujudkan Indonesia yang adil, mandiri, dan bermartabat.

Tantangan apakah yang akan dihadapi dalam perjalanan bangsa lima tahun yang akan datang? Sudah banyak kemajuan yang patut disyukuri. Instrumen demokrasi secara perlahan mulai terinstitusionalisasi. Kesejahteraan rakyat mulai meningkat dibandingkan kondisi sepuluh tahun yang lalu, stabilitas keamanan relatif terjamin, dan kehidupan bangsa yang bersifat multikultur mulai terbentuk kembali. Prestasi ini patutlah disyukuri.

Tetapi, sejumlah agenda memang belum terselesaikan. Kehidupan demokrasi masih membutuhkan penataan ulang. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi yang sedang berjalan belum mampu secara efisien menyerap aspirasi dan kehendak rakyat. Penataan ini harus dilakukan secara menyeluruh. Sistem kepartaian masih membutuhkan pembenahan agar mampu melaksanakan fungsinya secara optimal. Lembaga-lembaga negara belum sepenuhnya mampu menjalankan sistem pemerintahan yang efisien, bersih, terbuka, dan bertanggung jawab. Sementara itu, pranata dan aturan dalam sistem demokrasi masih belum mampu secara optimal dalam menyerap dinamika masyarakat. Sejumlah agenda ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan semakin menyurutkan harapan masyarakat terhadap proses demokratisasi. Oleh karena itu, penataan ulang kehidupan demokrasi adalah suatu keharusan untuk memenuhi harapan masyarakat dan memantapkan sistem demokrasi yang kita jalankan.

Mewujudkan kehidupan demokrasi yang stabil dan optimal dalam menyerap dinamika masyarakat, di samping sebagai perwujudan tanggung jawab dalam

menghargai hak rakyat dan meninggikan derajat manusia Indonesia, juga sistem demokrasi tersebut harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memecahkan berbagai problem ekonomi yang dihadapi bangsa.

Dalam aspek kemandirian, banyak kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian. Kepentingan rakyat belum optimal dikedepankan. Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perbaikan, namun pemerataan pendapatan belum terwujud. Sementara itu, keadilan masih belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Rakyat masih sulit memperoleh keadilan, terkendala oleh aparat penegak hukum yang belum bekerja secara profesional. Martabat bangsa juga belum sepenuhnya pulih dalam hubungan internasional. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri kurang memperoleh perlakuan yang baik merupakan sebagian kecil dari contoh berkurangnya martabat bangsa dalam pergaulan internasional.

Dengan berbagai tantangan tersebut, maka kesejahteraan harus segera diwujudkan secara konkret dalam wujud penurunan kemiskinan dan pengangguran, sambil terus berupaya meningkatkan pendapatan dan kualitas kehidupan manusia Indonesia. Kekayaan alam yang kita miliki adalah modal penting yang seharusnya dikelola secara efisien, berdaya guna, dan berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, tidak ada cara lain, desain perekonomian bangsa harus diorientasikan kepada terciptanya perekonomian nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan. Tiga prinsip ini, di samping merupakan pesan konstitusi yang paling mendasar, juga harus dijadikan pedoman pokok dalam mewujudkan kesejahteraan. Hanya dengan kemandirian, daya saing dan berkeadilan, ekonomi Indonesia dapat terhindarkan dari eksploitasi yang berlebihan, pengelolaan yang efisien, dan instrumen dalam mewujudkan pemerataan. Dengan cara inilah kita dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkesinambungan dan meningkatkan martabat bangsa.

Kehidupan bangsa yang sejahtera tersebut masih membutuhkan elemen lain yang sama pentingnya, yaitu terpeliharanya persatuan nasional. Persatuan ini tidak hanya harus diwujudkan dalam bentuk keutuhan NKRI, juga harus diwujudkan dalam bentuk tumbuhnya kehidupan multikultur yang solid, kuatnya solidaritas sosial dan kesetiakawanan sebagai satu bangsa. Elemen ini menjadi esensial dan sangat dibutuhkan karena karakter kebangsaan kita bersifat plural dari segi keyakinan, agama, adat dan budaya. Elemen-elemen tersebut harus terus tumbuh dan saling memperkuat, tanpa pemaksaan, karena seluruh anggota bangsa terikat pada komitmen dasar mewujudkan negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itulah, ketahanan sosial budaya adalah sebuah keharusan. Ketahanan ini hanya bisa diwujudkan apabila kehidupan multikultur tercipta, etos solidaritas sosial, dan kesetiakawanan menjadi sendi seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Semuanya itu membutuhkan perawatan yang berkesinambungan.

Agar pelaksanaan agenda pembaruan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya tersebut tetap dalam jalur yang benar, maka implementasi dari misi itu harus diorientasikan mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu terciptanya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, serta mengejar tujuan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Di samping itu, koridor penting lainnya adalah UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN) yang

menetapkan visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang.

Dengan arah tersebut, visi kami adalah mewujudkan **INDONESIA YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT**. Visi ini dapat diwujudkan melalui serangkaian kerja keras untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang mantap, stabil untuk kesejahteraan, pembangunan perekonomian nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan ketahanan sosial budaya untuk integrasi nasional yang menjamin kebhinnekaan. Dengan cara inilah kita mewujudkan keadilan, kemandirian dan martabat bangsa dan negara Indonesia.

Misi:

- **MEWUJUDKAN EKONOMI BANGSA YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERKEADILAN.**
- **MEWUJUDKAN DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH YANG SEHAT, EFESIEN DAN EFEKTIF .**
- **MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA UNTUK INTEGRASI NASIONAL YANG MENJAMIN KEBHINNEKAAN.**
- **MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

D. AGENDA KEBIJAKAN

I. BIDANG EKONOMI

1. Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi

Elemen pokok kesejahteraan rakyat adalah pangan dan energi. Kecukupan dua hal ini menjadi prasyarat penting, tidak hanya dalam kerangka memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga dalam kerangka memberi landasan bagi kemandirian bangsa.

Kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sementara itu, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian pertanian. Oleh karena itu, program kemandirian pangan harus diarahkan pada dua tujuan pokok, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani dan tercukupinya kebutuhan pangan nasional. Dua tujuan ini dapat dicapai apabila pembangunan pertanian dilakukan secara terintegrasi, mulai dari jaminan kesediaan lahan pertanian yang produktif (mengerem laju alih fungsi lahan), meningkatkan produktivitas lahan melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, sistem budi daya yang efisien, serta pengelolaan pascapanen yang efektif. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah efisiensi sistem tata niaga produk pertanian yang dapat menjamin kestabilan harga dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sama halnya dengan pangan, energi adalah kebutuhan pokok, di mana ketersediannya adalah sesuatu yang esensial untuk menjamin kesejahteraan. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sumber energi yang tersedia, khususnya energi fosil, tidak selamanya mampu mencukupi peningkatan permintaan energi. Oleh karena itu, pembangunan energi harus diorientasikan pada optimalisasi pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbarui (seperti panas bumi dan energi nabati) guna mencukupi kebutuhan energi nasional.

Prioritas penting dari kemandirian energi ini adalah pemerataan dan jaminan ketersediaan listrik bagi rakyat dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, pembangunan energi nabati harus segera digenjut untuk mengantisipasi semakin menipisnya cadangan energi fosil.

2. Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Negeri

Kemajuan ekonomi dapat terus ditingkatkan apabila produk-produk yang dihasilkan rakyat mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing akan meningkat apabila kita mampu meningkatkan nilai tambah produk nasional dan peningkatan nilai tambah hanya bisa dihasilkan apabila terdapat industri pengolahan.

Dengan dasar ini, maka membangkitkan kembali industri pengolahan adalah pilihan yang tidak bisa ditawar. Namun, kebangkitan industri pengolahan tidak boleh sekadar menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah rendah, melainkan harus diberi penguatan baru yang dapat meninggikan nilai tambahnya. Hanya dengan cara ini, produk nasional mempunyai daya saing, berkelanjutan, dan dapat berkompetisi pada level internasional.

Orientasi baru pada peningkatan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing tidak hanya berlaku untuk produk yang selama ini sudah dikenal menjadi menjadi andalan Indonesia, seperti tekstil dan turunannya atau industri sepatu, melainkan harus merambah pada sektor agroindustri, maritim, logam, transportasi, pertambangan, dan sektor lainnya.

3. Menciptakan Struktur Ekonomi Nasional yang Adil Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Harus diakui tulang punggung ekonomi nasional sekarang ini adalah UMKM. Oleh karena itu, peranannya harus terus ditingkatkan seiring dengan peranan strategisnya. Menghadapi tantangan ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah perjuangan yang tidak bisa ditawar. Seluruh kekuatan nasional harus memberi perhatian terhadap kebangkitan Koperasi dan UMKM. Para pelaku usaha yang bergerak dalam dunia koperasi dan UMKM harus diberi stimulus untuk meningkatkan skala usahanya, keterampilan manajemennya, dan memperdalam kandungan teknologi atau inovasi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Sementara itu, pemerintah harus memberi jaminan iklim usaha yang kondusif, mendorong munculnya kemitraan antar-pelaku di dalam UMKM serta memperkuat kemitraan dengan usaha besar guna membentuk rantai usaha yang sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan. Tak lupa, dukungan lembaga keuangan harus pula memadai. Beragam ikhtiar tersebut harus diorientasikan pada terciptanya struktur ekonomi nasional yang kuat dengan Koperasi dan UMKM sebagai tulang punggungnya.

4. Menjalankan Reformasi Agraria untuk Kesejahteraan Petani

Reformasi pertanian harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Reformasi tersebut diorientasikan untuk menjadikan pertanian tetap sebagai sektor usaha yang atraktif, menguntungkan, dan menghasilkan komoditi yang dapat mencukupi kebutuhan nasional.

Prasyarat penting untuk mencapai tujuan ini adalah adanya reformasi agraria. Reformasi agraria dimaksudkan agar ada jaminan ketersediaan lahan produktif pertanian, jaminan bahwa aset-aset lahan yang dimiliki petani Indonesia tidak mudah dialihfungsikan, dan garansi bahwa aset lahan petani dapat ditransformasikan menjadi modal dan kekuatan bagi pengembangan usaha pertanian. Dengan dasar ini, maka aset-aset lahan petani Indonesia dapat lebih mudah dioptimalkan pemanfaatannya dan didorong produktivitasnya.

Setelah adanya jaminan ketersediaan lahan, maka reformasi selanjutnya adalah menyediakan infrastruktur pertanian yang baik, mulai dari perbaikan dan perluasan sarana irigasi teknis, penggunaan teknologi pertanian yang tepat dan murah, penyediaan bibit unggul, penyediaan pupuk yang terjangkau, dan sarana distribusi komoditi yang efisien serta upaya-upaya lainnya. Semua ini dimaksudkan untuk tujuan ganda, yaitu menekan biaya produksi pertanian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi pertanian. Agar komoditas pertanian tetap atraktif, maka pemerintah harus membenahi tata niaga pertanian, mempermudah akses pasar, teknologi, dan permodalan. Hanya dengan cara ini, pertanian tetap menjadi sektor yang atraktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

5. Anggaran untuk Rakyat

APBN ke depan akan dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat, penghapusan kesulitan hidup, dan pengutamakan kepentingan mayoritas yang lebih besar dibandingkan kepentingan segelintir orang. Sementara itu, untuk anggaran rutin harus semakin efisien. Untuk itu, alokasi dan distribusi anggaran harus mengutamakan sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak, memberi stimulus terhadap sektro riil, serta penyediaan infrastruktur publik yang layak dan memadai.

Agenda lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola utang secara bertanggung jawab. Rasio utang terhadap PDB harus semakin diturunkan. Sementara itu, pemanfaatan utang harus dilakukan secara lebih optimal. Utang luar negeri yang terikat dengan program-program yang kaku dan dipaksakan, sudah seharusnya semakin dikurangi.

Sementara itu, secara perlahan dan sistematis, stok utang harus diturunkan, baik dalam maupun luar negeri. Utang yang bertumpuk selama ini, bagaimanapun merupakan beban berat yang berdampak rendahnya kemampuan fiskal dalam menstimulus perekonomian. Beban utang ini akan semakin berkurang apabila jumlah utang baru tidak semakin menumpuk, dan terus dilakukan penjadwalan dan atau pengurangan sebagian dari beban pembayaran bunga dan pokok utang.

6. Lembaga Keuangan dan Perbankan yang Mendorong Sektor Riil dan Memihak Rakyat.

Problem penting lembaga keuangan dan perbankan selama ini adalah tingginya risiko kredit sehingga fungsi intermediasinya menjadi rendah. Kredit yang mampu disalurkan ke sektor riil pun sangat jauh berkurang dibandingkan kemampuan portofolionya. Padahal, tanpa adanya dukungan lembaga keuangan dan perbankan yang memadai, dunia usaha tidak mungkin mampu bergerak secara dinamis.

Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia harus segera mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Perbankan harus didorong untuk secepatnya melakukan konsolidasi sebagaimana skema Arsitektur Perbankan Indonesia dengan penekanan pada kecukupan modal dan pengelolaan risiko. Kelembagaan BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya juga harus didorong guna menopang UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Agenda lain yang tak kalah pentingnya adalah desentralisasi kredit. Selama ini perbankan rajin menghimpun dana masyarakat dari berbagai pelosok Indonesia, namun alokasi kredit yang dikucurkan umumnya hanya terpusat di daerah-daerah yang sudah berkembang maju ekonominya. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan perbankan harus didorong mengucurkan kredit modal kerja dan investasi di daerah-daerah yang selama ini dianggap kurang berkembang.

7. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan pokok. Semakin maju ekonomi suatu negara maka kebutuhan infrastruktur fisiknya akan semakin

berkembang. Begitu juga sebaliknya, apabila pembangunan infrastruktur fisik tertahan, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan mengalami hambatan yang serius. Atas dasar ini, pemerintah harus mempercepat program pembangunan infrastruktur yang selama masa krisis tidak banyak mengalami kemajuan.

Percepatan ini sangat dibutuhkan untuk mengejar momen kebangkitan kembali ekonomi Indonesia. Program percepatan pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai sejak lima tahun yang lalu seharusnya semakin dipacu percepatannya untuk mengejar kebutuhan yang semakin meningkat.

Infrastruktur yang mutlak mendapat prioritas adalah pembangunan jalan tol untuk di daerah-daerah yang sudah berkembang, pembukaan jalan-jalan baru di daerah yang potensial, serta membuka daerah-daerah yang selama ini terisolir. Jalan trans Kalimantan dan Papua, umpamanya, adalah kebutuhan yang tidak mungkin lagi ditunda. Bersamaan dengan pembangunan jalan, perluasan jaringan kereta api juga sudah sangat mendesak. Jaringan kereta api di Sumatera dan Kalimantan, misalnya, adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak untuk menunjang aktivitas ekonomi di daerah ini yang sekarang sedang mengalami perkembangan pesat. Infrastruktur lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan pelabuhan dan dermaga-dermaga beserta infrastruktur yang mendukungnya.

8. Pembangunan Industri Maritim

Indonesia adalah negara kepulauan sehingga pengembangan industri maritim masih perlu dipacu. Pengembangan industri maritim harus dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari pembangunan industri transportasi laut, pengembangan budidaya hasil laut, pengembangan efisiensi industri penangkapan ikan, hingga industri pengolahan hasil-hasil kelautan beserta industri yang terkait lainnya. Di samping itu, perlu pula dibenahi sistem distribusi dan tata niaga komoditas kelautan. Target penting dari pengembangan industri kelautan ini peningkatan produksi hasil-hasil kelautan sehingga mampu menyamai negara-negara maritim lainnya.

9. Lingkungan hidup dan perubahan iklim

Masalah pokok dalam lingkungan hidup adalah bagaimana menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi dengan upaya melestarikannya. Di sinilah perlunya pemerintah melaksanakan perannya secara adil dan merata sehingga memberi manfaat pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Koherensi dan konsistensi pembuatan kebijakan dan peraturan yang menjamin keberlanjutan sumber daya alam selalu dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Seiring dengan upaya ini, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari terus dilaksanakan dan akan selalu dipertahankan.

Sektor penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah hutan. Upaya konservasi serta rehabilitasi hutan masih perlu ditingkatkan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan teknologi, keterampilan, penegakan hukum, dan peninjauan kembali atas perizinan perusahaan hutan sehingga Indonesia tetap menjadi salah satu paru-paru dunia.

Tantangan lainnya adalah masalah perubahan iklim. Cuaca yang terus berubah dapat mengacaukan sistem tanam, naiknya suhu air laut yang menyebabkan banjir hingga ancaman kerawanan pangan. Untuk itu harus mulai dilakukan penyesuaian berbagai kebijakan yang menyangkut perubahan iklim. Kebijakan penting yang perlu dilakukan adalah mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon.

II. BIDANG POLITIK DAN HUKUM

1. Memperkuat Sistem Presidensial yang Didukung Sistem Kepartaian yang Sederhana

Agenda penting dalam demokratisasi ke depan adalah memperkuat sistem presidensial. Sistem ini akan kokoh apabila didukung oleh sistem kepartaian yang sederhana dan sistem pemilu yang efisien. Penyederhanaan partai dapat dilakukan dengan memperketat ambang batas partai yang boleh masuk di parlemen. Kalau sekarang ini hanya 2,5 persen, maka ambang batas untuk periode ke depan harus dinaikkan. Di samping itu, persyaratan pendirian partai baru harus diperketat. Tidak hanya harus dibuktikan secara faktual berupa keluasan dan keberagaman pengikutnya, melainkan pula harus dibatasi kemungkinan partai yang tidak lolos hanya berganti nama, demi bisa mengikuti Pemilu selanjutnya. Cara lain yang bisa ditempuh adalah memberi dorongan agar partai melakukan penggabungan.

Pemilu yang bertingkat-tingkat sudah sangat mendesak untuk didesain ulang agar lebih sederhana dan tidak memboroskan energi. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menyeragamkan waktu pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Legislatif. Dengan adanya keseragaman waktu pelaksanaan ini, maka tidak banyak sumber daya yang terbuang percuma.

2. Menata Kembali Fungsi Lembaga-lembaga Negara

Sistem perwakilan yang berlaku sekarang ini menganut sistem tiga kamar, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Namun desain fungsi dan perannya hanya memberi tekanan kepada DPR untuk menjalankan fungsi *budget*, legislasi, dan pengawasan. MPR yang dianggap lembaga tertinggi negara hanya mempunyai fungsi yang sangat terbatas. Sementara itu, DPD tidak mempunyai kewenangan apapun kecuali memberi usul dan masukan kepada DPR. Kondisi ini jelas menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara didorong untuk melakukan penataan ulang agar peran dan fungsinya berimbang dan proporsional.

Di bidang eksekutif, jumlah departemen dan kementerian masih terlalu banyak. Sampai tingkat tertentu, fungsi lembaga-lembaga eksekutif ini bersifat tumpang tindih. Kondisi ini menyulitkan koordinasi dan bahkan menjadi sumber inefisiensi. Untuk itu diperlukan kemauan politik yang kuat dari penyelenggara negara untuk menyederhanakan jumlah departemen dan kementerian agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi.

3. Mengefektifkan Hubungan Pusat dan Daerah

Gubernur dan bupati yang dipilih langsung oleh rakyat telah mendorong kuatnya posisi dan peran kepala daerah. Di satu sisi, hal ini sangat menggembirakan karena menunjukkan legitimasi yang kuat dari pemerintahan daerah sehingga memungkinkan untuk melakukan percepatan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, situasi itu kerap kali mengganggu efektivitas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Program-program pemerintah pusat kerap kali menghadapi kendala pada level pemerintahan daerah ketika diimplementasikan langsung di rakyat. Padahal, sebagaimana diamanatkan UU Pemerintahan Daerah, posisi gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Otonomi pada level kabupaten/kota tidak menghilangkan hak pemerintah pusat untuk melakukan fungsi pemerintahan di daerah.

Kondisi yang serba ambigu ini mendorong perlunya perumusan ulang hubungan pemerintahan pusat dan daerah tanpa mengurangi otonomi daerah yang sudah berlaku sekarang ini. Harus ditegaskan bahwa dalam sistem negara kesatuan yang kita anut, pemerintah daerah diwajibkan untuk mendukung beleid pemerintah pusat. Untuk itu, revisi UU pemerintahan daerah tampaknya merupakan keharusan untuk mempertegas fungsi dan peran pemerintah daerah serta menjaga efektivitas hubungan pemerintah pusat dan daerah.

4. Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Tangkas, Tanggap, dan Cepat

Reformasi birokrasi yang sekarang berjalan, perlu ditingkatkan akselerasinya, untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, dan cepat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat *front office* pelayanan publik. Di samping itu, *reward* dan *punishment* di dalam birokrasi harus ditata ulang agar lebih adil dan proporsional. *Merit system* harus ditegaskan dan KKN harus tetap diberantas. Gebrakan-gebrakan dalam reformasi birokrasi ini adalah suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan dinamika demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi.

5. Meningkatkan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Kancah Internasional

Peranan Indonesia dalam percaturan dunia sudah mulai pulih kembali. Momentum ini perlu dimanfaatkan agar peran Indonesia dalam percaturan internasional semakin meningkat. Strategi yang tepat untuk itu melaksanakan diplomasi progresif. Indonesia harus proaktif dalam berbagai forum internasional. Peran Indonesia harus terus dimantapkan dalam berbagai forum internasional. Misalnya dalam ASEAN, Gerakan Non Blok, APEC, OKI, PBB dan forum internasional lainnya. Di samping itu, diplomasi ekonomi harus mulai mendapatkan perhatian yang sangat serius. Hal ini dikarenakan agenda-agenda ekonomi nasional, misalnya pengembangan ekspor, sangat membutuhkan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat, supaya kepentingan nasional mendapat dukungan dunia internasional.

6. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kendatipun asas-asas penting dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) sudah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundangan, perlindungan HAM tidak selesai dengan perumusan perundangan. Hal penting lainnya adalah bagaimana pemerintah menjaga melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tugas ini dapat dilaksanakan secara optimal apabila pemerintah secara berkesinambungan mampu membangun etos aparatur negara yang sadar terhadap tugasnya untuk melindungi HAM.

7. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi konstitusi. Ketentuan ini harus semakin dimantapkan agar penegakan hukum dapat berlangsung lebih adil dan tidak memandang latar belakang seseorang. Penegakan hukum harus berlaku untuk semua warga negara karena hukum berlaku untuk semua. Untuk mewujudkan hal ini, institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, harus didorong proaktif dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Lembaga penegakan hukum harus menjadi contoh terdepan dari aparat yang bersih dan bekerja secara profesional.

8. Menciptakan Kepastian Hukum melalui Peraturan Perundangan

Kepastian hukum adalah kebutuhan yang sangat esensial bagi pengaturan kehidupan politik ekonom dan sosial budaya. Tanpa adanya kepastian hukum, interaksi sosial menjadi terhambat dan dapat menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai agenda menciptakan kepastian hukum dengan mendesain sistem peraturan perundangan yang koheren, antisipatif, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sistem hukum demikian dapat diwujudkan apabila pemerintah bersungguh-sungguh membenahi peraturan perundangan yang compang-camping. Terlalu banyak peraturan perundangan yang tidak koheren satu sama lain, juga terlalu banyak peraturan perundangan yang sudah tertinggal jauh dengan dinamika masyarakat. Politik hukum tidak boleh sekadar normatif dan legalis, imun dari dinamika masyarakat. Politik hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan nasional kenegaraan dan kebangsaan.

9. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Bagian lain yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah elemen penting bagi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum, niscaya hukum menjadi mandul dan tidak bermakna. Atas dasar ini, maka agenda yang perlu diteruskan adalah menggalakkan sosialisasi kesadaran hukum. Target utamanya adalah menciptakan masyarakat sadar hukum sehingga mengetahui dengan benar hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

III. BIDANG HANKAM

1. Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI

Harus disadari bahwa ancaman dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara telah berkembang jauh, seperti infiltrasi melalui teknologi informasi, sengketa perbatasan, maraknya *illegal logging and fishing*, dan bentuk-bentuk ancaman lainnya. Untuk itu, TNI harus terus didorong untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah memperkuat pengamanan daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Kehadiran TNI dalam wilayah-wilayah tersebut perlu terus ditingkatkan, baik dari segi personel maupun sarana dan prasarannya, untuk mencegah penyelundupan atau penyerobotan batas negara. Untuk memperkuat pertahanan daerah-daerah perbatasan dan pulau terdepan, maka perlu didukung dengan program penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan pulau terdepan.

2. Mengikis Tindak Kejahatan, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

Polri sebagai garda depan penjagaan keamanan negara perlu terus ditingkatkan peranannya dalam mengikis tindak kejahatan dan menciptakan keamanan dan ketertiban. Peran ini perlu terus digalakkan mengingat jenis kejahatan telah berkembang luas. Tidak hanya kejahatan konvensional yang menjadi gangguan, melainkan kejahatan kekayaan negara, kejahatan transnasional, hingga berbagai peristiwa yang menimbulkan efek kontijensi. Bahkan belakangan ini, tindak pidana terorisme menjadi ancaman yang sangat potensial. Luasnya ragam gangguan keamanan tersebut menyebabkan Polri dituntut terus-menerus meningkatkan peran profesionalnya.

3. Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) TNI Polri.

Alutsista TNI dan Polri yang sudah tua, harus dimodernisasi. Hal ini mendesak dilakukan agar pertahanan Indonesia semakin kokoh dan kemampuan Polri dalam menangani persoalan keamanan semakin tinggi. Modernisasi alutsista TNI harus dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan industri pertahanan di dalam negeri. BUMN yang bergerak dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan dapat menjadi garda depan modernisasi alutsista. Di samping itu, modernisasi alutsista dapat pula menggandeng berbagai potensi industri dalam negeri lainnya, misalnya PAL untuk perkapalan atau IPTN untuk kedirgantaraan. Strategi memanfaatkan industri di dalam negeri ini perlu terus digalakkan demi mengurangi ketergantungan pada alutsista impor.

4. Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Keamanan

Persoalan krusial lainnya yang dihadapi TNI dan Polri adalah anggaran yang kurang memadai. Biaya pertahanan yang dialokasikan APBN sekarang ini jauh dari mencukupi kebutuhan ideal pertahanan NKRI. Sementara itu, kesejahteraan prajurit TNI jauh tertinggal dibandingkan aparatur negara lainnya. Padahal, tugas yang diemban harus mempertaruhkan nyawa.

Masalah ini perlu segera dibenahi dan membutuhkan gebrakan tersendiri. Pemerintah harus segera melakukan terobosan di tengah keterbatasan APBN, untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri. Di samping cara konvensional dengan menambah alokasi anggaran untuk TNI, pemerintah dapat pula melakukan terobosan-terobosan lain tanpa harus menyalahi peraturan perundangan. Untuk itu, para pucuk pimpinan penyelenggara negara harus mempunyai komitmen kuat dan kemauan politik dalam mensejahterakan prajurit TNI Polri.

IV. BIDANG PENDIDIKAN

1. Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pendidikan melalui Sistem Evaluasi yang Proporsional

Problem krusial dalam dunia pendidikan kita adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan. Daerah perkotaan umumnya mempunyai kualitas pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah tertinggal. Masalah ini sudah banyak diupayakan selama pemerintahan sebelumnya, namun masih perlu ditingkatkan. Daerah-daerah yang mempunyai kualitas pendidikan rendah diberi perangsang lebih banyak untuk segera mengejar ketertinggalannya. Di samping itu, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar-daerah dan sistem evaluasi pendidikan harus dilakukan secara proporsional. Menyamakan sistem evaluasi pendidikan di kota besar dengan daerah tertinggal jelas menunjukkan ketidakadilannya. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah perlunya memberi akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar berprestasi di daerah-daerah yang relatif tertinggal.

2. Meningkatkan Penyediaan Pendidikan yang Terjangkau melalui Anggaran yang Memadai

Sesuai dengan amanah konstitusi, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan pendidikan dasar. Konstitusi juga menggariskan *budget* yang harus disiapkan sekitar 20 persen dari anggaran negara. Dengan amanah ini, maka program wajib belajar sembilan tahun perlu terus digalakkan. Sekolah gratis yang dimotori sekolah-sekolah pemerintah harus segera ditularkan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Setidaknya, pemerintah harus membatasi biaya-biaya yang dikenakan oleh lembaga pendidikan swasta. Ini semua dalam kerangka memberikan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang memadai dan terjangkau.

3. Mempertegas Pendidikan Kejuruan melalui Diversifikasi Keahlian

Untuk mengantisipasi permintaan tenaga kerja terampil dan semi terampil yang akan terus meningkat, pemerintah seharusnya mendorong lahirnya sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan tidak boleh menumpuk pada bidang tertentu saja, melainkan harus didorong agar tercipta sekolah kejuruan yang mempunyai diversifikasi yang luas. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena permintaan tenaga kerja semakin lama akan semakin spesifik seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, pemerintah harus pula menyiapkan kurikulum sekolah kejuruan yang

sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Ini semua dimaksudkan agar lulusan sekolah kejuruan sudah siap bekerja. Untuk mewujudkan hal ini, maka konsep *link and match* dunia pendidikan dengan dunia kerja harus diwujudkan.

V. BIDANG SOSIAL DAN KESEHATAN

1. Meningkatkan Solidaritas Sosial, Kesetiakawanan, dan Memupuk Semangat Nasionalisme

Solidaritas sosial dan kesetiakawanan adalah esensi penting dari kehidupan kebangsaan Indonesia. Etos ini harus terus-menerus diperkaya dan diwujudkan dalam berbagai sendi kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah harus memfasilitasi dan mendorong lahirnya kehidupan multikultur yang lebih baik, yang ditandai oleh penghormatan atas keberagaman dan saling ketergantungan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dan komitmen bersama sebagai satu bangsa. Tujuan ini dapat diwujudkan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari kehidupan kecil dalam Rukun Tetangga, kelompok-kelompok sosial hingga yang cakupannya luas, yaitu kehidupan kebangsaan nasional. Untuk mewujudkan hal ini, maka revitalisasi Pancasila sebagai dasar dan komitmen kebangsaan mutlak terus-menerus digalakkan dengan pendekatan baru yang lebih humanis dan tidak doktriner.

2. Pemberdayaan bagi Kalangan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Wujud penting solidaritas sosial adalah kepedulian kita terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan anak-anak terlantar. Sesuai dengan amanah konstitusi, masalah ini adalah menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadi pelopor gerakan pemberantasan kemiskinan. Mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan harus segera diberdayakan, dengan memberikan bimbingan, bantuan, hingga santunan. Akses kalangan miskin terhadap fasilitas dasar dan publik harus dibuka lebar-lebar dan tanpa sama sekali membebani mereka, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, pemerintah sudah seharusnya memberikan bantuan pelatihan, permodalan, akses pasar yang memadai serta bantuan-bantuan lainnya, agar kalangan yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat hidup secara layak, mandiri, dan meningkat kemampuan ekonominya.

4. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Dokter dan Tenaga Medis yang Memadai bagi Daerah Tertinggal atau Kurang Berkembang

Infrastruktur kesehatan di daerah miskin dan kurang berkembang selama ini tertinggal dibandingkan di kota-kota besar. Padahal, problem kesehatan sama sekali tidak mengenal tingkat pendidikan maupun kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang, baik dalam bentuk penyediaan rumah sakit yang memadai, peralatan medis yang cukup, pengobatan yang cukup, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di samping itu, daerah tertinggal atau kurang berkembang berhak pula untuk

memperoleh bantuan SDM medis yang memadai, baik tenaga dokter maupun tenaga paramedis lainnya. Infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga medis harus dilakukan dalam bentuk satu paket. Ini dimaksudkan agar infrastruktur kesehatan yang disediakan pemerintah dapat segera dioperasikan oleh tenaga-tenaga medis yang memadai.

5. Memperluas Jangkauan Asuransi Kesehatan menuju Terwujudnya Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dengan tersedianya rumah sakit, sarana dan prasarana kesehatan, serta tenaga medis yang memadai hingga di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang, maka pemerintah mempunyai modal yang cukup untuk melancarkan program jaminan kesehatan. Target jangka pendek yang harus mendapat prioritas adalah asuransi kesehatan bagi rakyat miskin. Berbagai program asuransi kesehatan bagi rakyat miskin yang sekarang ini sudah berjalan perlu terus mendapat dukungan dan perluas jangkauan geografisnya, khususnya bagi daerah tertinggal, kantong kemiskinan, dan daerah lain yang kurang berkembang. Setelah itu, jangkauan asuransi kesehatan perlu diperluas kepada golongan masyarakat lainnya

Mewujudkan asuransi kesehatan bagi warga negara Indonesia adalah langkah awal yang sangat penting dalam kerangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional, sebagaimana dimanahkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk itu, perlu segera dirintis program nasional untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Semua ini perlu dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya.

Pengembangan sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya adalah perwujudan dari sistem *welfare state* yang juga dianut dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, keberhasilan program ini pada dasarnya adalah memenuhi amanah konstitusi untuk mewujudkan "kesejahteraan umum".

E. Penutup

Indonesia yang kita warisi sekarang harus mencerminkan cita-cita dari para pendiri bangsa ini. Para pendiri bangsa memimpikan sebuah Indonesia yang memberikan pengayoman, perlindungan sekaligus ruang gerak yang luas bagi semua warga negara. Bagaikan rumah, maka Indonesia adalah rumah bagi semua rakyatnya. Indonesia adalah rumah yang indah karena ditopang keragaman pilar-pilar yang kuat. Kami berkeyakinan bahwa Indonesia yang adil, mandiri, dan bermartabat adalah cita-cita para Bapak Bangsa yang diamanahkan kepada generasi penerusnya.

Berbagai peristiwa telah mengantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini patut kita syukuri. Namun demokrasi yang sedang berjalan sekarang ini harus terus didorong agar semakin sehat dan efisien. Dengan begitu kita akan terpacu untuk menciptakan pemerintahan bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Solidaritas sosial harus terus dirawat karena

inilah yang menjadi modal dasar kehidupan kebangsaan. Demokrasi yang kita bangun harus pula didorong untuk mensejahterakan warga negaranya.

Pengangguran dan kemiskinan adalah agenda yang harus menjadi prioritas. Pelayanan publik dan infrastruktur dasar perlu terus ditingkatkan. Sementara itu, pemerataan harus terus diupayakan untuk mengikis jurang perbedaan yang besar. Dunia usaha harus terus bergairah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Semua ini dimaksudkan untuk menciptakan perekonomian yang mandiri, adil, dan berdaya saing.

Upaya ini harus diteruskan oleh semua pemimpin bangsa ini. Menyambung apa yang sudah dilakukan, mempercepat upaya-upaya mensejahterakan rakyat, dan memperkuat landasan ekonomi selanjutnya untuk mewujudkan visi bangsa. Kerja besar ini memang membutuhkan komitmen yang kuat. Dan kami bersyukur apabila rakyat memberikan amanah itu kepada kami.

SUMBER: TIM KAMPANYE NASIONAL JUSUF KALLA-WIRANTO